



GUBERNUR ACEH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PEMERINTAH ACEH TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUZAKIR MANAF**

Jabatan : **GUBERNUR ACEH**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Banda Aceh, 2025

GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PEMERINTAH ACEH
TAHUN 2025**

No	TUJUAN	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)			(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Aqidah, Syariah, dan Akhlak	1.1	Meningkatnya pelaksanaan Syariat Islam	Persentase dayah yang mandiri	44 %
		1.2	Meningkatnya penyaluran terhadap pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah	Indeks Zakat Nasional Aceh	0,62
2	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan muamalah	2.1	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan Syariat Islam serta kemakmuran mesjid	Indeks kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan syariat islam	83,5 %
3	Meningkatkan pengawasan kehidupan keagamaan	3.1	Meningkatnya pembinaan akhlak dan kerukunan antar dan sesama ummat	Persentase dimensi toleransi	65,07 %
		3.2	Meningkatnya upaya pencegahan potensi konflik	Persentase potensi konflik yang tertangani	100%
4	Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh	4.1	Terakomodirnya butir- butir MoU Helsinki dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Indeks Reintegrasi Aceh	0,08
		4.2	Menguatnya pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe	Persentase pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga Wali Nanggroe	90 %
		4.3	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban	Indek Pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	52,5 %
				Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban	95 %
				Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	61,17 %
		4.4	Terwujudnya pelaksanaan kebudayaan dan adat istiadat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,53-56,56
		4.5	Terwujudnya pelaksanaan keistimewaan dibidang pendidikan	Persentase penerapan kurikulum pendidikan islami dan ke-Aceh-an di kabupaten/kota	17,39 %
		4.6	Terwujudnya peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah	Persentase fatwa dan tausiyah yang telah ditetapkan untuk diterapkan	20,81%
5	Mewujudkan kemandirian ekonomi	5.1	Terwujudnya peningkatan produksi hilirisasi pangan utama	Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	117,66
		5.2	Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Indeks Inovasi Daerah	56,00
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,78 %
				Peringkat Inovasi Daerah	Peringkat 13

		5.3	Terwujudnya industrialisasi sektor unggulan	Presentase Dana untuk Inovasi dari APBA	0,5 %
				Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	12 ribu orang
				Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	0,4 %
				Proporsi UMKM terhadap jumlah angkatan kerja (%) (sebagai proxy proporsi PDRB ekonomi kreatif)	16,41 %
				Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	4,81 %
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,84 %
				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,78 %
6	Meningkatkan stabilitas ekonomi makro	6.1	Meningkatnya penerimaan Aceh	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,14 %
		6.2	Terbukanya jaringan pasar domestik dan global	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	64,13-64,79 % PDRB
				Indeks Harga Konsumen	110 %
		6.3	Meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi berstatus mandiri	Persentase kawasan transmigrasi berstatus mandiri	14,28571 %
		6.4	Terwujudnya perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Persentase Desa Mandiri	0,54
		6.5	Pendalaman/intermediasi sektor keuangan	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,45 %
				Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	1443395
				Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,92
				Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	18,88
				Total Kredit/PDRB (%)	18,10
7	Menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal	7.1	Meningkatnya pemanfaatan lahan-lahan terlantar dan HGU	Persentase pemanfaatan lahan terlantar	14,53 %
		7.2	Terwujudnya lumbung pangan Aceh	Indeks Ketahanan Pangan	75,14
				Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%))	8,48 %
		7.3	Meningkatnya pembangunan infrastruktur investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,44 - 32,77 % PDRB
		7.4	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja Sektor Formal dan Informal	Persentase lapangan kerja Menurut Status Formal dan Informal	42 : 58
				Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	42 %
8	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, perumahan dan pulau terluar	8.1	Meningkatnya ketahanan air daerah	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	30,47 %
				Indeks Ketahanan Air Daerah	3,58

		8.2	Meningkatnya penyediaan dan penataan perumahan dan pemukiman yang layak huni	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	68,5
		8.3	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	5,63%
		8.4	Tersedianya jaringan listrik yang terkoneksi dan mandiri sampai ke pulau terluar	Rasio Elektrifikasi	99,45%
		8.5	Meningkatnya koneksitas wilayah dan pulau terluar untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang	Rasio Konektivitas	0,7
9	Meningkatkan kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang	9.1	Meningkatnya kinerja perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase kepatuhan pembangunan terhadap rencana tata ruang	70%
		9.2	Tersedianya jaringan teknologi informatika yang terkoneksi	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5.7
10.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	10.1	Meningkatnya akses pendidikan	Harapan Lama Sekolah	14,66-14,68 Tahun
		10.2	Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Kualitas Pendidikan (SPM)	70,67%
				Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	8,70 – 13,04%
				Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	0,00 – 3,00%
				Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	58,19%
				Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	30,00 - 32,00%
				Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	27,00 - 29,00%
				Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	13,58%
				Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,20-10,21 Tahun
		10.3	Meningkatnya minat baca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca	73,28
		10.4	Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup (UHH)	70,7 Tahun
11.	Menguatkan kesetaraan gender, hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas	11.1	Meningkatnya keluarga berkualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan, anak, dan kesejahteraan disabilitas	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,44
				Indeks Pembangunan Gender	92,85
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66,7

				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	68,34
				Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	22%
		11.2	Meningkatnya sistem kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	0,57
12	Peningkatan prestasi olah raga serta kepemudaan	12.1	Meningkatnya kualitas olahraga dan kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	62
13.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintah Aceh	13.1	Terwujudnya tata kelola Pemerintah Aceh yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government)	Indeks Pelayanan Publik	4,47
				Nilai SAKIP	67,5
				Opini BPK	WTP
		13.2	Tersedianya database perencanaan dan penganggaran serta pengawasan yang valid, akurat, dan terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	93
		13.3	Terwujudnya kompetensi sumberdaya aparatur Pemerintah Aceh yang berintegritas dan melayani	Indeks Profesionalisme ASN	84
		13.4	Terwujudnya sistem digitalisasi dalam pelayanan publik	Indeks Transformasi Digital	50,1
		13.5	Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi APIP dalam pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Integritas Nasional	70,2
				Maturitas SPIP terintegrasi	Level 3
		13.6	Terwujudnya kepatuhan hukum dalam melayani publik	Indeks Reformasi Hukum	68,5
14.	Meningkatkan stabilitas politik	14.1	Terwujudnya partisipasi politik secara demokratis	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,9
15.	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan yang lestari	15.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,89
				Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	15%
		15.2	Meningkatnya kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,592
		15.3	Terwujudnya pengelolaan sumber energi baru dan terbarukan	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	107,25
				Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	9,41%
16.	Meningkatkan resiliensi terhadap bencana	16.1	Meningkatnya ketahanan daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,5

Program

- 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
- 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
- 3 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Anggaran

2.090.459.319.399
881.941.406.055
563.540.000

4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	202.571.000
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.156.602.341
6	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	214.358.337.712
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.531.841.631
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	552.319.174
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	68.309.347.353
10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	793.906.913.938
11	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.559.942.260
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	297.274.139
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	855.858.290.843
14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	29.865.217.000
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	102.052.954.758
16	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	34.507.100.452
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	93.835.594.695
18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	13.602.172.927
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	75.064.064.363
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	101.870.071.603
21	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	352.021.130
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.181.539.109
23	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	63.028.375.946
24	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.773.599.666
25	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	232.737.760
26	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	139.319.926.877
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41.919.482.024
28	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	153.396.380.218
29	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	252.101.571.576
30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.112.131.182
31	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.192.558.408
32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.709.263.793
33	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	17.522.374.784
34	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-
35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.675.797.905
36	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	6.178.574.320
37	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	300.000.000
38	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	21.641.471.473
39	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.736.398.355
40	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	19.474.680.403
41	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.820.862.200
42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.310.412.957
43	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.202.249.173

44	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-
45	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	513.784.234
47	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	540.230.890
48	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	283.084.060
49	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	2.875.756.150
50	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	625.618.907
51	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.007.480.422
52	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	399.467.388
54	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	933.874.686
55	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	323.811.470
56	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	121.803.879
57	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	360.107.454
58	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	217.358.946
59	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	200.000.000
60	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.196.493.665
61	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.889.511.283
62	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	5.570.935.000
63	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.490.568.129
64	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.427.706.046
65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.601.582.383
66	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	65.756.000
67	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	25.695.676
68	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	22.119.785
69	PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH	750.616.868
70	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	91.352.740
71	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	331.745.469
72	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	532.503.537
73	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	334.389.906
74	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	126.416.690.825
75	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	185.922.095
76	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.809.193.132
77	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	34.831.185
78	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	55.236.660
79	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	220.987.153
80	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	96.924.450
81	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	36.287.960
82	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.167.448.000
83	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	58.486.621.937
84	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	7.089.518.350
85	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	5.101.342.626

86	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	500.000.000
87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.247.375.011
88	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	214.765.612
89	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	156.181.338
90	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	320.879.073
91	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	51.252.180
92	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.785.902.532
93	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	101.904.446
94	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.062.332.318
95	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.465.106.086
96	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	60.597.124.228
97	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	84.143.099.052
98	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	11.283.159.693
99	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	790.452.514
100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.655.985.340
101	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.430.821.047
102	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	7.238.350.039
103	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	258.495.000
104	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	364.650.260
105	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.978.564.190
106	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	567.481.874
107	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	771.421.043
108	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	508.515.620
109	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.302.698.660
110	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	24.551.594.999
111	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	9.933.797.465
112	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.792.842.174
113	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	194.648.953
114	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	816.377.790
115	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	583.711.852
116	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	108.531.755
117	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	80.759.952
118	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.917.818.361
119	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.880.521.151
120	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	160.543.335.765
121	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	6.000.000.000
122	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.428.157.942
123	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	875.951.954
124	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.982.929.409
125	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	5.978.466.493

126 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.086.146.308
127 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	807.622.268
128 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	10.245.809.162
129 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	21.776.044.511
130 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	10.669.442.094
131 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	11.492.040.744
132 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.552.542.442
133 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	656.700.665
134 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.244.504.276
135 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	11.854.121.959
136 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.256.849.146
137 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	109.140.460
138 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	155.787.000
139 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.692.230.024
140 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.788.000.000
141 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	8.651.445.850
142 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	17.117.778.002
143 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.150.000.000
144 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	18.470.953.330
145 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	110.102.196.446
146 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	118.833.181.227
147 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	63.945.749.562
148 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.631.200.000
149 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.548.414.893
150 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	8.103.650.000
151 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.297.762.444
152 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.901.932.367
153 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.829.092.800
154 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.033.534.979
155 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.101.562.542
156 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.000.966.832
157 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	41.668.250
158 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	734.854.750
159 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	108.272.880.722
160 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	6.094.300.080
161 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.526.594.173
162 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	477.191.000
163 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	492.117.738
164 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	6.027.656.269
165 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	368.539.205

166 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.473.908.856
167 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	206.389.376
168 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.784.431.263
169 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	22.102.000
170 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	20.458.708
171 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	219.463.622.115
172 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	778.858.050
173 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.016.714.121
174 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.852.280.702
175 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.623.035.976
176 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.910.798.981
177 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	870.657.112
178 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	754.565.095
179 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.746.303.998
180 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.812.823.002
181 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.297.490.745
182 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.323.462.706
183 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.225.863.512
184 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	8.895.033.438
185 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	151.798.229.257
186 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	87.374.929.796
187 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.401.917.508
188 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	12.324.042.099
189 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.708.165.345
190 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.966.285.945
191 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	150.895.880.706
192 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.814.000.771.421
193 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.927.560.792
194 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	23.076.828.866
195 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.005.552.851
196 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.910.616.536
197 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.125.558.024
198 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	48.120.925.411
199 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.338.194.732
200 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.661.785.144
201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	43.836.102.727
202 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.109.048.000
203 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	5.950.188.252
204 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.951.759.806
205 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.291.955.735

206 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	31.106.984.362
207 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	414.872.238
208 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	786.841.587
209 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.016.816.500
210 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.111.283.355
211 PROGRAM REINTEGRASI ACEH	22.220.388.218
212 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.439.660.516
213 PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	32.880.576.612
214 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.501.343.218
215 PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	6.881.785.838
216 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.013.394.582
217 PROGRAM KEURUKON KATIBUL WALI/ SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH	17.986.035.708
218 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.080.713.869
219 PROGRAM BAITUL MAL ACEH	258.366.367.731



GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF

PANCACITA